

PEMBERDAYAAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PESISIR

EMPOWERMENT OF COASTAL COMMUNITY INDEPENDENCE

Oleh:

Muh. Nur Yamin¹, Muh. Reza², Hidayat Ruslan³

^{1, 2, 3} Universitas Negeri Makassar

¹ nuryamin1@gmail.com, ² muhrezahidayat35@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar serta faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data interaktif melalui tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan pengujian kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir telah di laksanakan dan sesuai dengan tahapan dan standar pelaksanaan yang ada. Hal ini dilihat dari beberapa program yaitu sosialisasi oleh pemerintah provinsi dan kota yang di prakarsai oleh pemerintah pulau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dampak pemberdayaan terhadap kemandirian masyarakat bertujuan membangun kemandirian masyarakat pesisir di pulau lakkang serta berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. adapun faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pulau lakkang yaitu sudah terbangun konsep kesadaran dalam melakukan segala macam kegiatan yang sesuai dengan hukum yang ada. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pesisir pulau lakkang kecamatan tallo Kota Makassar, antara lain terbatasnya modal, faktor alam, sarana dan prasarana, kurangnya gairah wisata, tidak adanya penghasilan rutin, dan kurangnya pengetahuan penggunaan fasilitas.

KATA KUNCI: Pemberdayaan, Masyarakat, Pesisir Lakkang, Pemerintah Makassar

ABSTRACT: This study aims to determine the Empowerment of Coastal Communities in Lakkang Island Tallo District Makassar City and the supporting and inhibiting factors for Empowering Coastal Communities in Lakkang Island, Tallo District, Makassar City. This study uses a qualitative approach. Data collection is done through observation techniques, interviews, and documentation. The data analysis technique used in this study is interactive data analysis through the stages: data condensation, data presentation, and conclusion testing. The results of this study indicate that the empowerment of coastal communities has been carried out and in accordance with the existing implementation stages and standards. This can be seen from several programs, namely socialization by the provincial and district governments initiated by the village government to improve the welfare of coastal communities. The impact of empowerment on community independence aims to build the independence of coastal communities on Lakkang Island and reduce community dependence on the government. As for the supporting factors in empowering the coastal communities of Langkakan Island, namely the concept of

awareness has been built in carrying out all kinds of activities in accordance with existing laws. The inhibiting factors for the empowerment of the coastal community on Lakkang Island, Tallo sub-district, Makassar City, include limited capital, natural factors, facilities and infrastructure, lack of enthusiasm for tourism, lack of regular income, and lack of knowledge about the use of facilities.

KEYWORDS: *Empowerment, Communities of Lakkang, Government Makassar*

PENDAHULUAN

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang dianut dalam lingkungannya. Society berasal dari bahasa Inggris yaitu "society" yang berarti "society", kemudian kata society berasal dari bahasa latin "societas" yang berarti "teman". Komunitas yang berasal dari bahasa Arab adalah "musharak". Pengertian masyarakat dalam arti luas adalah seluruh hubungan hidup bersama tanpa dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan sebagainya.

Masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh kelas, bangsa, wilayah, dan sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena mempunyai tujuan yang sama. Pengertian Masyarakat secara sederhana adalah sekelompok orang yang berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama. Terbentuknya masyarakat karena manusia menggunakan perasaan, pikiran dan keinginannya untuk bereaksi dalam lingkungannya.

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang sebagian besar merupakan nelayan, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh hubungan yang erat dengan karakteristik ekonomi daerah, latar belakang budaya dan

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Pada umumnya masyarakat pesisir memiliki budaya yang berorientasi selaras dengan alam sehingga teknologi pemanfaatan sumber daya alam merupakan teknologi yang adaptif dengan kondisi pesisir. Masyarakat pesisir pada umumnya adalah nelayan, dimana nelayan dalam ensiklopedia Indonesia tergolong pekerja, yaitu orang yang aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencaharian. Pengertian Nelayan dalam Buku Statistik Perikanan Indonesia menyebutkan bahwa Nelayan adalah orang yang aktif bekerja dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lain/tanaman air. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.17/Men/2006 Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan. Pembudidaya ikan adalah masyarakat yang mata pencahariannya adalah kegiatan budidaya ikan, baik di perairan segar, payau dan di perairan pantai.

Wilayah pesisir di Pulau Lakkang Kecamatan Tallo merupakan salah satu wilayah Kota Makassar yang memiliki potensi sumberdaya perairan untuk mengembangkan usaha di bidang perikanan tangkap (budidaya tangkap). aspek konservasi sumber daya secara efektif, efisien, optimal, dan berkelanjutan melalui program pemberdayaan masyarakat. Konsideran Menimbang Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ditetapkan

bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling memengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dijaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, dengan langkah-langkah konservasi.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menetapkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, maka pengelolaan sumber daya harus dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya. Pemerataan dimaksud adalah mewujudkan pemenuhan hak dasar masyarakat, yang meliputi Hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, Hak untuk memperoleh perlindungan hukum, Hak untuk memperoleh rasa aman, Hak untuk memperoleh akses akan kebutuhan hidup yang terjangkau, dan Hak untuk memperoleh keadilan. Tanpa pemenuhan hak dasar tersebut, akan sulit diharapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor kelautan.

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat dinamis. Di berbagai daerah, termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir di Pulau Lakkang merupakan wilayah pesisir yang sangat strategis, namun dalam pengelolaannya terjadi tumpang tindih antar kebijakan pemerintah. Hal ini kemudian memicu terjadinya permasalahan lingkungan, kerusakan sumber daya, dan ketidakmampuan daya dukung lahan untuk mendukung aktivitas kehidupan di kawasan tersebut. Dalam

rangka mendayagunakan daya alam, termasuk daya alam laut dan pesisir harus dikelola dengan sistem berwawasan lingkungan berdasarkan norma hukum dengan tingkat kesadaran dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Memperhatikan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat didalamnya yang menjadi permasalahan hampir setiap wilayah pesisir Indonesia adalah kemiskinan dan keterbelakangan baik dalam hal kesejahteraan maupun tingkat pendapatan perkapita, bila dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan dan sebagainya. Di wilayah laut juga terdapat berbagai sumber daya yang memiliki potensi ekonomi tinggi yang harus dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir dan keluarganya. Masyarakat pesisir terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lain yang kondisi sosial ekonominya bergantung pada sumber daya alam. Laut merupakan segmen anak bangsa yang umumnya masih tergolong miskin.

Kesejahteraan masyarakat pesisir memerlukan program terobosan baru yang dapat meningkatkan akses terhadap permodalan, pengelolaan dan teknologi serta dalam mentransformasikan struktur dan budaya masyarakat pesisir dan masyarakat secara berkelanjutan. Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengaku sebagai program berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), namun ironisnya masyarakat masih belum merasa memiliki program-program tersebut, sehingga tidak heran banyak program-program yang ada, hanya untuk kehidupan proyek dan berakhir tanpa dampak yang signifikan terhadap masyarakat. kehidupan

komunitas. Pertanyaan kemudian muncul apakah konsep pemberdayaan itu salah ataukah pemberdayaan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari sekelompok orang?. Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang pada akhirnya menciptakan kemandirian yang permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Setiap kelompok masyarakat harus mendapat perlakuan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan kegiatan ekonominya.

Pemberdayaan masyarakat nelayan misalnya membutuhkan fasilitas penangkapan ikan dan kepastian wilayah penangkapan ikan. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang di butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, serta masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan masing-masing kelompok yang berbeda tersebut menunjukkan adanya keragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan pada masing-masing kelompok tersebut. Dengan demikian program pemberdayaan masyarakat pesisir harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak menggeneralisasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, terutama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir harus bersifat bottom up dan open menu, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus menyentuh langsung kelompok masyarakat.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 tentang “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut PWP-3-K adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan

oleh pemerintah dan pemerintah pengetahuan daerah, antar sektor, antara eksistem dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut menegaskan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mengawasi pembangunan secara berkelanjutan, kualitas lingkungan pesisir, baik wilayah darat, payau dan laut/pantai, ditempat masyarakat melakukan aktivitas budaya. Dengan demikian pemerintah punya data dasar kualitas wilayah pesisir, untuk mengetahui arah pola pembangunannya.

Pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi dan mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya aktifitas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daerahnya. Dengan begitu pemerintah daerah memiliki kewajiban secara konsisten mengelola potensi-potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya adalah pengembangan dan pengelolaan di wilayah pesisir, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti memasukan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar. Meskipun fokus dan permasalahan tidak sama persis, tetapi sangat membantu peneliti dalam menemukan sumber pemecahan masalah pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Nusaiba Zahratul Firdaus (2019) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat

Pesisir melalui Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Gulamah (Studi Kasus Pulau Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program KUBE Gulamah. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas 3 tahapan yaitu: tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan diantaranya: proses tahapan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program KUBE Gulamah yaitu (a) tahap perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, dan pendampingan (b) tahap pelaksanaan meliputi usaha penangkapan hasil laut, usaha budidaya tambak, penyuluhan dan pelatihan, pertemuan rutin, proses penyaluran bantuan, tabungan (c) tahap evaluasi dilakukan dengan cara pertemuan rutin sebulan sekali dengan metode diskusi yang dihadiri oleh pengurus, anggota, pendamping, dan Kepala Pulau Panggung. Bentuk keberdayaan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program KUBE Gulamah dapat dilihat melalui enam indikator, antara lain kebebasan mobilitas, kemampuan membeli komoditas kecil, terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga, memiliki kebebasan relatif dari dominasi keluarga, kesadaran hukum dan politik, serta memiliki jaminan ekonomi dan kontribusi keluarga. Indikator keberdayaan lainnya seperti kemampuan membeli komoditas besar dan

keterlibatan dalam kampanye kurang berdaya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zahratu firdaus nusaibah dengan peneliti terbaru terletak pada teori, indikator yang digunakan, juga pada lokus penelitian.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Derta Rahmanto (2015) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Untung Jawa dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Kemandirian Nelayan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang tepat bagi masyarakat pesisir pulau Untung Jawa dan menganalisis upaya peningkatan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan Pulau Untung Jawa. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis, atau dalam penelitian hukum biasa disebut normatif terapan/normatif empiris. Model pemberdayaan yang bertujuan membangun kemandirian nelayan pulau Untung Jawa dapat dilaksanakan dengan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Perlu sinergitas antara peran pemerintah baik aparat pulau dan instansi terkait lainnya, LSM yang peduli atau pun perusahaan, kampus maupun masyarakat nelayan itu sendiri.

Faktor pendukung dan faktor penghambat yang harus diperhatikan dan dicarikan solusinya. Faktor pendukung antara lain sudah terbangun konsep kesadaran dalam melakukan segala macam kegiatan yang sesuai dengan hukum yang ada, potensi wisata dan produksi perikanan, aparat Pulau yang cukup aktif dan kesiapan SDM untuk memotivasi diri dan menerima pendampingan serta berbagai pelatihan. Adapun faktor penghambatnya antara lain: terbatasnya modal, faktor alam, sarana prasarana, kurangnya gairah wisata, daya minat beli dan daya minat permainan air, tidak adanya penghasilan rutin, honor pekerja yang kurang dari

UMP, SDM, dan kurangnya kesadaran hukum, bantuan hukum dan perlindungan hukum. Adapun kebaruan ilmiah dari penelitian terdahulu dimana fokus dan lokus yang berbeda penelitian terdahulu berfokus terhadap kesadaran hukum sedangkan penelitian terbaru berfokus pada peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir, dan juga pada teori yang digunakan. Sehubungan hal tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Pulau Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pulau Lakkang, Kecamatan Tallo Kota Makassar Sulawesi Selatan. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara peneliti dengan informan atau narasumber. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Dinas Perikanan (Pejabat fungsional dinas perikanan kota makassar) “1 Orang”, Pejabat Pulau (Lurah Lakkang) “1 Orang”, Lembaga Swadaya Masyarakat (Harapan Jaya) “3 Orang”, dan Masyarakat pesisir / kelompok masyarakat “3 Orang”. Sedangkan untuk Data Sekunder (sumber data tertulis), yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dari berbagai literatur-literatur yang ada yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas, buku-buku atau referensi-referensi teoritis, peraturan perundang-undangan, doktrin dari berbagai pakar dan data-data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data terdiri dari Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara Triangulasi dan Member Check. Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Miles, Huberman, Saldana (2014), bahwa analisis data penelitian kualitatif mencakup proses Pengumpulan Data, Kondensasi Data (Data Condensation), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusions Drawing and Verifications)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan upaya untuk mengembangkan potensi kemandirian yang ada di setiap daerah khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir yang tak lepas dari setiap masalah kehidupan yang mereka alami. Kehidupan yang seakan menjadi takdir mereka. Masalah datang silih berganti kehidupan perekonomian seakan menjerat kehidupan masyarakat pesisir di tambah dengan kebutuhan hidup keluarga yang semakin hari semakin mahal. Kemiskinan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pesisir seakan menjadi hal yang harus dikaji secara mendalam oleh pemerintah yang ada disetiap daerah di Indonesia saat ini berbagai program telah di buat akan tetapi dalam tata pelaksanaan masih menghadapi berbagai fenomena yang perlu di telaah secara mendalam.

Proses pemberdayaan masyarakat pesisir tentunya mengacu pada undang undang nomor 6 tahun 2014 dimana peraturan tersebut secara tegas menjelaskan tentang proses pemberdayaan masyarakat secara

mendalam. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di Pulau Lakkang Kecamatan Tallo kota Makassar telah dilaksanakan beberapa program dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir berikut adalah hasil wawancara dengan Penanggung jawab Pulau pesisir kec. Tallo kota Makassar terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir HJM. “HJM mengatakan bahwa pihak pemerintah kota Makassar khususnya dinas perikanan telah memperlihatkan kinerja yang maksimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir, akan tetapi belum tercapainya peningkatan sumber daya alam secara merata sementara masyarakat sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dalam memanfaatkan hasil laut di pulau Lakkang”.

Dalam pelaksanaan kapitalaung diberikan kewenangan untuk dalam proses pemberdayaan masyarakat berdasarkan aturan yang termuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pulau. Dimana Pemberdayaan Masyarakat merupakan wujud dari pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang tersebar disetiap daerah. Hal Relevan juga di katakan oleh Dewan fasilitator Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) dimana Menurut Beliau: “Menurut HR dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pulau lakkang selalu berpatokan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat pesisir sehingga prosedur pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat”.

Program pelaksanaan masyarakat pesisir bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di pulau dengan melihat setiap kebutuhan masyarakat yang ada di pulau. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu kaur Pembangunan pesisir Pulau Lakkang. “SY mengatakan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

pesisir yang ada di pulau lakkang telah di laksanakan melalui tahapan-tahapan yang ada di pulau lakkang proses pelaksanaan pun di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan dan petani”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di pesisir pulau lakkang kota Makassar telah di laksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ada. kemudian pelaksanaan program melibatkan beberapa dinas baik dari provinsi maupun kabupaten. di samping itu juga proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dilaksanakan dengan melihat kebutuhan yang kompleks bagi masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat yang ada di pesisir pulau lakkang Kecamatan Tallo kota Makassar.

Pemberdayaan Masyarakat Pulau adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Pulau. Upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang di berdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan Masyarakat menurut Aprillia Theresia (2015:93) adalah Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan pemerintahan pulau adalah sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan yang ada di

pulau. Tentunya segelintir program di buat dan di laksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ada yang berfokus pada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di pesisir pulau lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar di laksanakan sesuai dengan pemanfaatan kebutuhan masyarakat pulau.

Pengetahuan

Pengetahuan merupakan bagian terpenting dalam upaya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana pengetahuan dijadikan kekayaan intelektual masyarakat dan harus di pertahankan dan dikembangkan secara berkesinambungan dalam konteks pengembangan dalam lingkungan masyarakat pesisir. Hal ini juga dikatan oleh ketua LPM Pulau Lakkang. “Perlu adanya pendampingan dari pemerintah, kita dapat meningkatkan pendapatan agar bias memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga dengan pelatihan jadi bias menambah modal dan pengetahuan”

Kemampuan menjadi implikasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada di pulau. Kemampuan yang di miliki harus di barengi dengann pengetahuan yang memadai di mana di perlukan pendekatan ilmu yang bersifat konseptual yang setidaknya tidak bersifat tradisional lagi. Berikut adalah hasil wawancara terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan di pesisir pulau lakkang yaitu penanggung jawab pesisir pulau lakkang kec. Tallo kota Makassar yaitu bapak KW: “Beliau mengatakan bahwa dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat pesisir telah di laksanakan sosialisasi tentang proses pembesaran udang dan ikan bagi kelompok masyarakat nelayan di samping itu juga perna di laksanakan pendampingan atau sosialisasi berupa pembudidayaan rumput laut bagi nelayan, jadi di sini

pemerintah pulau berupaya membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir di pulau”.

Senada yang dikatakan oleh pejabat pulau Lakkang dalam hal ini Lurah Lakkang bapak IW: “Hak-hak dapat dipenuhi para nelayan dalam mengembangkan usahanya.yang dulunya cuman menangkap ikan di laut sekarang sudah bisa bikin tambak udang dan ikan. Tambak ini kan punya bersama jadi bisa meningkatkan kekompakan dan kepedulian sesama”.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa segala upaya telah dicoba dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat pulau lakkang yang terus mencoba memberdayakan masyarakatnya dengan bantuan-bantuan dari pemerintah setempat serta masyarakat yang saling mendukung satu sama lain untuk memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di pulau lakkang dengan tujuan agar masyarakat pulau lakkang dapat hidup sejahtera dengan sumber daya yang mereka miliki dan hal tersebut harus dimanfaatkan dengan baik.

Keterampilan

Keterampilan adalah merupakan untuk menggunakan akal, pikiran, ide dan kreatifitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun membuat suatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Keterampilan atau kemampuan tersebut pada dasarnya akan lebih baik terus di asah dan di latih untuk menaikkan kemampuan-kemampuan sehingga menjadi ahli atau menguasai dari salah satu bidang keterampilan yang ada. Dalam hal ini dikutip dari bapak Lurah Lakkang. “Keterampilan yang

dimiliki oleh masyarakat pulau Lakkang masih kurang karna menangkap hasil panen secara sederhana, maka dari itu diperlukan pendampingan khusus dari pemerintah provinsi maupun kota dalam menangani hal ini”.

Masyarakat pesisir pada umumnya bersifat tradisional dimana dalam proses pengembangan keterampilan menggunakan teknik-teknik turun temurun yang meraka dapat dari nenek moyang mereka. Di samping itu profesi yang di jalani oleh masyarakat pesisir yaitu tidak terlepas dari keadaan geografis yakni tinggal di wilayah perairan sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan ketua kelompok nelayan bapak SY Ia juga mengatakan: “Keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir pada umumnya masih bersifat tradisional dimana masyarakat masih mempertahankan teknik-teknik yang di wariskan secara turun-temurun. Ini di buktikan dengan keadaan sehari-hari masyarakat nelayan yang menangkap ikan masih menggunakan cara-cara lama seperti, menggunakan perahu dayung dan cara penangkapan yang masih menggunakan teknik-teknik tradisional dengan mengandalkan perubahan arah angin dan arus laut. Di samping itu juga dalam teknik pengolahan ikan hasil tangkapan masi menggunakan cara lama yakni dengan cara pengasapan. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan. seperti melakukan inovasi terhadap cara pembudidayaan dengan cara hanya menabur benih ikan dan udang tanpa memberinya makanan. Hal ini menurut nelayan tambak untuk membuat ikan tetap segar ketika di pasarkan dan tak mudah busuk karena tidak diberikan bahan kimia yang notabene bertujuan untuk menggemukkan ikan tersebut”.

Hal yang sama di katakan oleh salah satu pejabat pemerintah dinas perikanan kota makassar ibu RD, beliau mengatakan: “Keterampilan pemberdayaan didukung oleh pemerintah agar dapat mencapai kesuksesan dalam pemberdayaan masyarakat pada suatu daerah”.

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama narasumber, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya pulau lakkang telah didukung oleh pemerintah yang dimana pemerintah mendukung pemberdayaan masyarakat salah satunya melalui keterampilan. Sehingga masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah harus tau dan menguasai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir.

Program

Program merupakan kata, ekspresi atau pernyataan yang di susun dan di rangkai menjadi satu kesatuan, prosedur yang berupa urutan langkah, untuk menyelesaikan masalah yang di implementasikan. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan di pesisir pulau lakkang di perlukan program untuk memacu potensi sumber daya manusia yang ada di pulau. pemberdayaan masyarakat sangatlah penting peran pemerintah pulau menjadi tolak ukur keberhasilan masyarakat pulau dalam meningkatkan kesejahteraan. Proses pemberdayaan masyarakat pesisir mengacu pada peraturan yang telah dibuat dimana pemberdayaan masyarakat pulau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kualitas hidup masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana pulau, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penanggung jawab masyarakat di pesisir pulau lakkang yaitu Bapak HJM: “Beliau mengatakan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir lewat program pemerintah pulau sudah sesuai dengan tahapan yang ada dengan mengikuti standar pelaksanaan yang di laksanakan oleh pemerintah kota. Ini sudah jelas dengan beberapa program yang telah di laksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir di lakkang kec tallo kota Makassar”.

Hal senada juga di sampaikan pejabat Pulau Lakkang ia mengatakan: “Pelaksanaan program sudah sesuai dengan harapan kebutuhan masyarakat pesisir, dimana program pemberdayaan masyarakat mengikuti standar pembangian anggaran dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir pulau lakkang kecamatan tallo kota Makassar.”

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dimana program pemberdayaan harus melibatkan pemerintah sepenuhnya dengan membangun hubungan kerja sama dengan masyarakat lewat swadaya murni masyarakat pesisir. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu masyarakat HR, Beliau mengatakan: “Upaya pemberdayaan masyarakat pesisir lewat program pemerintah pulau sudah dapat mendukung proses kerja masyarakat. Dan juga terdapat program pemerintah pada bidang pembangunan infrastruktur. Beliau juga menambahkan perlu dibuat program yang mencakup keseluruhan kebutuhan masyarakat pesisir agar lebih maksimal lagi kedepannya”.

Pelaksanaan program dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan di pesisir pulau lakkang merupakan hal terpenting dalam hal peyelenggaraan pemerintahan pulau melihat dari tugas

dan fungsi pemerintah pulau adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau dan memberdayakan masyarakat pulau lewat program yang di laksanakan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pulau Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat pesisir pulau lakkang kecamatan tallo kota Makassar yakni faktor pendukung dan faktor yang menghambat proses program pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil pengumpulan data di pesisir pulau lakkang kec. Tallo kota Makassar menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang mensukseskan program implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pejabat pulau lakkang yaitu bapak IR sebagai berikut: “Faktor pendukung yang ada di pulau kita ini yaitu Potensi Budidaya Perikanan. Pulau Lakkang memiliki potensi sumberdaya perikanan budidaya yang terdiri dari sungai ataupun tambak seluas 100 ha. Ini menunjukkan komonitas perikanan yang bisa diunggulkan dan memiliki letak wilayah strategis, bagaimana agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup serta pemanfaatan sumber daya alam khususnya nelayan”.

Selain itu, penjelasan tersebut senada dengan pandangan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan kecamatan tallo kota Makassar yaitu Ibu RD berikut ini: “Dari segi program yang menjadi kebutuhan pokok bagi para nelayan belum dapat dipenuhi oleh dinas

perikanan maupun pemerintah pulau yang harusnya menyediakan semua kebutuhan masyarakat agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar”.

Lebih lanjut, penjelasan terkait keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat pesisir, juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat nelayan yaitu HR sebagai berikut: “Kami masyarakat nelayan diuntungkan dengan kegiatan pemberdayaan yang terpadu antara pemerintah pulau yaitu kerjasama dan membentuk program pemberdayaan dari pemerintah provinsi, kota dan pulau lakkang kota Makassar”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa salah satu faktor yang mensukseskan program pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau Lakkang adalah adanya keserasian antara kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pejabat pulau lakkang dan Kota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah kota Makassar.

Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, menunjukkan adapula beberapa hal yang menghambat proses implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, sebagaimana hasil wawancara penulis terhadap informan penelitian yakni perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat Ibu RD sebagai berikut: “Salah satu hal yang menghambat proses implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pulau lakkang adalah adanya ketidak jelasan kewenangan antara pihak pemerintah provinsi dan pihak pemerintah”. “Beberapa faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pesisir yang mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam melakukan aktivitas

sehari-hari. Sehingga setiap kegiatan masyarakat bisa terkendala atau terhambat dengan adanya beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan sehari-hari khususnya yang masyarakat pesisir pulau Lakkang”.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut, telah ditemukan bahwa ada hambatan yang ditemukan dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pulau lakkang kec tallo kota Makassar. Akan tetapi, hambatan tersebut dapat diatasi dengan mengintensifkan komunikasi dan koordinasi aktif antara masyarakat, pemerintah pulau lakkang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar. Hal tersebut dikemukakan oleh penanggung jawab pulau lakkang KW sebagai berikut: “...sebagai perwakilan masyarakat pulau lakkang, saya hanya intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait pelaksanaan program pemberdayaan tersebut, sehingga mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hambatan yang ditemukan dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di pulau lakkang kec tallo kota Makassar adalah tumpang tindih (*overlapping*) antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar dengan dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi selatan. Sehingga tumpang tindihnya kewenangan tersebut melahirkan hambatan dalam implementasi program tersebut.

Dampak Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya untuk membangkitkan kesadaran, membangun kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan segala macampotensi

yang dimiliki, dan membuat masyarakat secara mandiri mengembangkan potensi tersebut (Haryono, 2021:8). Pemberdayaan adalah suatu proses dan sekaligus hasil dari proses tersebut (Tampubolon, 2012). Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial (Sutarto, 2018). Tujuan utama pemberdayaan menurut Suharto (2017) adalah “memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, karena kondisi internal (seperti persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)”. Prinsip pemberdayaan menurut Najiyati, Asmana, & Suryadiputra, (2005) adalah; (1) Kesetaraan, (2) Partisip. Hal ini di katakana oleh bapak lurah Lakkang bapak IR: “Masyarakat pulau Lakkang harus memiliki pendampingan yaitu dari dinas perikanan yang biasanya memberikan pengarahan cara pengelolaan hasil tangkap dan cara pembuatan alat tangkap”. (Wawancara dengan IR, 24 Mei 2023)

Sama halnya yang dikatakan oleh ketua LPM pulau Lakkang bapak HR, yaitu: “...dengan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, masyarakat dapat menikmati serta meningkatkan kualitas hidup mereka”. (Wawancara dengan HR, 24 Mei 2023)

Adapun yang dikatakan oleh perwakilan nelayan pulau lakkang yaitu bapak SY yang mengatakan bahwa: “...kami para nelayan sangat terbantu dengan adanya program dari pemerintah sosialisasi yang telah diberikan dapat kami ketahui para nelayan dapat tau cara pembibitan udan dan ikan serta

pembuatan alat tangkap dan paling penting kami bisa meningkatkan rasa kekeluargaan antar nelayan”. (Wawancara dengan SY, 24 Mei 2023)

Ketergantungan pada Pemerintah

Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat bottom up dan top down, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pesisir seharusnya lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat terkait potensi yang dimiliki oleh pulau itu sendiri. Sayangnya potensi yang demikian besar tersebut belum diberdayakan secara optimal, sehingga masyarakat pesisir di Indonesia masih berada dalam kondisi miskin, dengan kata lain masih belum sejahtera. Hal ini dikatakan oleh penanggung jawab dari pulau Lakkang bapak KW: “... masyarakat pulau lakkang mengalami ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah pulau ataupun kota dikarenakan keterbelakangan masyarakat pulau lakkang dalam membiayai perikanannya karna 90% masyarakat pulau Lakkang adalah nelayan”. (Wawancara dengan KW, 24 Mei 2023)

Pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat lebih maksimal menggali potensi sumber daya alam yang tersedia. Lakkang merupakan salah satu pulau yang berada di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Selain memiliki perairan yang cukup luas, pulau ini juga memiliki potensi perikanan yang cukup besar bila dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Senada yang dikatakan oleh ketua LPM pulau Lakkang bapak HR: “...pemerintah provinsi ataupun kota harus memperhatikan masyarakat pulau

Lakkang walaupun akses terpencil tetapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di pulau lakkang juga harus dipenuhi”. (Wawancara dengan HR, 24 Mei 2023)

Program pemberdayaan masyarakat mempunyai esensi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai pelaksana dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya sosial, SDM dan lingkungan alam dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Pemberdayaan masyarakat di Pulau Lakkang merupakan salah satu konsep pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi lingkungan yakni potensi alam yang ada disekitar masyarakat. Pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan pelatihan, sosialisasi dan pemahaman agar masyarakat dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan keahliannya dalam memanfaatkan potensi alam yang dapat bernilai ekonomi sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta pemanfaatan sumber daya. Menurut bapak Lurah Lakkang Bapak IR: “...masyarakat pulau Lakkang adalah sebagian besar nelayan sehingga sangat bergantung pada hasil tangkap mereka oleh karena itu masyarakat lakkang juga sangat mengharapkan tercapainya program pemerintah”. (Wawancara dengan IR, 24 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan diatas maka dari itu, peneliti menarik kesimpulan bahwa masyarakat pesisir pulau Lakkang masih mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah karena masyarakat pesisir pulau Lakkang yang masih mengalami keterbelakangan yang menyebabkan masyarakat pesisir pulau lakkang masi tergantung kepada pemerintah juga selain karena keterbelakangan yang dimiliki oleh pulau

Lakkang , pulau lakkang juga merupakan daerah dengan akses terpencil yang membuat masyarakat pulau Lakkang sulit untuk memenuhi kebutuhannya tanpa adanya bantuan dari pemerintah setempat.

Kemandirian Masyarakat

Peningkatan kemandirian dalam pemberdayaan mendorong masyarakat untuk bekerjasama dengan kelompok formal maupun informal. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan insight hasil kegiatan positif dari kelompok tersebut terkait berbagai bidang kehidupan. Kelompokkelompok tersebut berfungsi memberikan kegiatan untuk melatih dan mendukung anggotanya sehingga dapat membantu perkembangan anggota dengan cara memberikan wadah untuk mengembangkan potensinya. Adapun yang dikatakan oleh perwakilan nelayan pulau Lakkang bapak SY: “...kegigihan para nelayan dalam menangkap hasil laut sangat bagus, dengan cara sederhana mereka bisa membiayai keluarganya, alat tangkap jaring pun hanya seadanya sehingga hasilpun rendah”. (Wawancara dengan SY, 24 Mei 2023)

Dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena pemberdayaan merupakan suatu proses yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat membebaskan dari kemiskinan, menumbuhkan kekuatan dan memiliki kemandirian. Menurut hasil observasi peneliti Menyatakan masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, mempunyai kemampuan dan pengetahuan dalam pemenuhan kehidupan adalah tujuan dari pemberdayaan masyarakat yang terjadi pada sebuah perubahan sosial juga

menyebutkan: "...pemberdayaan bertujuan menciptakan masyarakat yang berdaya mandiri, mampu, kuat dan bertanggungjawab atas kehidupan mereka masing-masing".

Hal yang dikatakan oleh bapak KW: "...selaku perwakilan pulau Lakkang keadaan cuaca buruk sangat berpengaruh dalam kegiatan melaut pada nelayan dan hanya melaut ditepi ahirnya cukup minim penghasilan". (Wawancara dengan KW, 24 Mei 2023)

Adapun yang dikatakan oleh pejabat pulau Lakkang bapak lurah Lakkang Bapak IR, yaitu: "...masyarakat pulau Lakkang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan saling membantu untuk melengkapi kebutuhan hidup mereka". (Wawancara dengan IR, 24 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan diatas bahwa Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki maka berdasarkan definisi singkat mengenai kemandirian masyarakat peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kemandirian masyarakat pesisir pulau Lakkang dapat dikatakan sudah baik karena masyarakat pesisir pulau Lakkang masih menangkap hasil laut dengan cara yang sederhana seperti menggunakan alat tangkap jarring seadanya yang walaupun hasilnya rendah akan tetapi hal tersebut bisa membiayai keluarga para nelayan.

PENUTUP

Adapun yang menjadi kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan berdasarkan pemberdayaan masyarakat pesisir dalam

meningkatkan kesejahteraan di Pesisir Pulau Lakkang Kecamatan Tallo kota Makassar: (1) Pemberdayaan masyarakat pesisir pulau lakkang telah berhasil di laksanakan, terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan salah satunya yaitu sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan Kota yang di prakarsai oleh pemerintah Pulau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program di pesisir pulau lakkang kecamatan tallo kota Makassar dalam upaya pemberdayaan Masyarakat pesisir lewat progaram pemerintah pulau sudah sesuai dengan tahapan yang ada dengan mengikuti standar pelaksanaan yang di laksanakan oleh pemerintah kota dan pelaksanaan program pemberdayaan didukung oleh pemerintah agar dapat mencapai kesuksesan dalam pemberdayaan masyarakat pada suatu daerah. (2) Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang harus diperhatikan. Faktor pendukung antara lain sudah terbangun konsep kesadaran dalam melakukan segala macam kegiatan yang sesuai dengan hukum yang ada, potensi wisata dan produksi perikanan, aparat Pulau yang cukup aktif dan kesiapan SDM untuk memotivasi diri dan menerima pendampingan serta berbagai pelatihan. Adapun faktor penghambatnya antara lain: terbatasnya modal, faktor alam, sarana prasarana, kurangnya gairah wisata, tidak adanya penghasilan rutin, dan kurangnya pengetahuan penggunaan fasilitas. Keterampilan masyarakat pesisir pulau lakkang juga masih menggunakan teknik tradisional dengan hasil yang sangat baik ini dapat di lihat dari perkembangan masyarakat pulau. akan tetapi dari teknik pengolahan masih tidak maksimal. Ini di sebabkan karena keterbatasan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir pulau lakkang, oleh karena itu pemerintah setempat lebih memperhatikan hal tersebut. (3) Dampak

pemberdayaan terhadap kemandirian masyarakat bertujuan membangun kemandirian masyarakat pesisir pulau Lakkang telah berdampak dengan kerjasama dan partisipasi antar masyarakat. Adapun dampak yang lebih jelas dari pemberdayaan terhadap kemandirian masyarakat salah satunya ialah berkurangnya ketergantungan dari masyarakat pesisir pulau Lakkang terhadap pemerintah, yang walaupun masyarakat pesisir pulau Lakkang tidak serta merta langsung melakukan kemandirian akan tetapi setidaknya masyarakat pesisir pulau Lakkang akan berusaha memikirkan masa depan dengan bertahap hingga masyarakat pesisir pulau Lakkang berhasil melakukan kemandirian terhadap masyarakatnya. Maka dari itu, kemandirian masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat dapat berinovasi sehingga generasi kedepannya tidak lagi ketergantungan terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Theresia. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Edi, S. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Miles, H., & Huberman, A. M., Saldana. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. New York: Sage Publications, Inc.
- Najiyati, Asmana, & Suryadiputra. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International
- Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press.
- Nusaiba Zahratul Firdaus. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) Gulamah (Studi Kasus Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)*. (Skripsi) IAIN Purwokerto Jawa Tengah
- Peraturan Menteri AGRARIA DAN TATA RUANG Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1 tentang “pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP-3-K)
- Rahmanto, D., & Purwaningsih, E. (2016). Pemberdayaan masyarakat pesisir Pulau untungjawa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 111-125.
- Sutarto, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Persepektif Gender. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 267-283.
- Tampubolon, D. (2012). Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Sorot*, 8(2), 153-161.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Utami, T., Demartoto, A., Haryono, B., Sunesti, Y., & Humsona, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pangan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(2).

